

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad, Ali. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang- Undang (Legisprudence) Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Cahyani, T. D. 2020. *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Dahwadin, S. S., Somantri, M. D., Syaripudin, E. I., & Sunarsa, H. S. 2019. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Penerbit Mangku Bumi.
- Diantha, I Made Pasek, 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Pranamedia Group
- Efendi, J., Ibrahim, J. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Preanadamedia Group
- Fajar,A.M. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, I. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normaif. Malang: Banyumedia Publishing.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.

Isnaeni, Moch. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama

Kasiram, M. 2010. Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian. Malang: UIN, Maliki Press.

Kristiawanto, 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: Prenada Media Group

Mamudji Sri. 1990. Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat. Rajawali Press: Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2017. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Muhammad. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group

MH, M. W. N. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Institut Agama Islam Agus Salim Metro.

Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. 2022. *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.

Rahman, E. T., & Ahyani, H. 2023. Hukum Perkawinan Islam.

Siswanto, D. 2020. *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press.

Soebani, B.A. (2008). Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang. Bandung: Pustaka Setia

Susilo, B. (2007). Prosedur Gugatan Cerai. Yogyakarta: Pusaka Yustisia.

Syaifuddin. (2012). Hukum Perceraian. Palembang: Sinar Grafika.

Tutik, T. T. (2014). Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, cet. ke-4.

Jakarta: Kencana.

#### **ARTIKEL DALAM JURNAL**

Abror, K. (2019). Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga. *Asas*, 11(01), 24-37.

Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1).

Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem perkawinan nyentana dalam kajian hukum adat dan pengaruhnya terhadap akomodasi kebijakan berbasis gender. *Jurnal ilmu sosial dan Humaniora*, 6(2), 168-177. Annisa, A. P. *PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Adnyani, N. K. S. (2018). Pelayanan Sektor Publik Terkait Pengaturan Administrasi Kependudukan Tentang Identitas Anak Dengan Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 200-203.

Adnyani, N. K. S. (2019). Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung. *Kertha Wicaksana*, 13(2), 121-130.

Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.

Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 59-66.

Aryani, K. A. T., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2026). Studi Literatur: Perkembangan Psikologis dan Sosial Anak Melalui Pola Asuh Otoritatif dalam Kekuasaan Orang Tua. *Journal Of Innovative and Creativity*, 6(1), 8947-8959.

Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 486-494.

Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2023). TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 DI KABUPATEN TABANAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 564-572.

Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 62-80.

Handayani, N., Ridwan, MS, & Ishak, N. (2024). ANALISIS PELAKSANAAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-

HAK PEREMPUAN PASCACERAI GUGAT. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* , 5 (1), 204-219.

Haryani, A. T., Nugroho, S. S., Pusparini, N. I., & Iswati, R. (2024). Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Isteri dan Anak dalam Perkara Gugat Cerai. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 24-29.

Ismail, W., Zainuddin, A., & Zulkarnain Suleman, Z. (2024). IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS 1 A. *AS-SYAMS* , 5 (2), 76–107.

Kholifatin, R., Adianto, H., & Jaeni, A. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Pelayanan Kebidanan dalam Pemberian Asuhan di Rumah Sakit. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(5), 868-876.

Kurniati, E. (2018). Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Authentica*, 1(1), 24-41.

Kurniawan, H. (2024). Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 314-324.

Kusuma, P. R. A., Adnyani, N. K. S., Yudiawan, I. D. G. H., Prasetya, W. A. H., Aulia, P. K., Holy, N. K. P. P., ... & Sari, N. K. D. (2025). Local Governments' Role in Restricting Travelers Under Law No. 15/2023

Bali Province. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 221, p. 03011). EDP Sciences.

Maharani, M. D., Landrawan, I. W., & Dantes, K. F. (2023). IMPLEMENTATION OF ARTICLE 45 OF LAW NO. 16/2019 ON CHILD CUSTODY BY DIVORCED PARENTS IN SINGARAJA DISTRICT COURT. *International Journal of Law, Tourism, and Culture*, 1(3), 160-182.

Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.

Musawwamah, S. (2020). The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women's Cases on Laws As an Effort of Women Empowerment In The Judiciary in Madura. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(1), 67-92.

Mustofa, M. Z., & Ahmad, J. (2004). Status Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(04), 1-18.

Najichah, N. (2020). Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Isteri. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1), 42-60.

Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157-170.

- Nawafitrid, V., Widyaningrum, A., NS, F. H., & Ashshidiqqi, E. A. (2024). Hak-hak isteri dan anak pasca cerai talak. *Jurnal Bevinding*, 1(12), 21-31.
- Novalia, S., & Hakim, A. R. (2024). Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), 639-655.
- Praja, A. W., Apriansah, A., & Susanto, B. (2023). Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 527-536.
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 178-185.
- Suci, A. M., Arisma, T. F., & Putri, S. K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 89-98.
- Sukirman, A., Mukhlas, O. S., & Rosadi, A. (2025). Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 671-699.
- Suryani, D. C., & Asyhadie, H. Z. (2024). Pelaksanaan Sema Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mataram. *Private Law*, 4(2), 553-563.

Tiawati, S., & Pura, M. H. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).

Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.

Yuni, L. A. (2021). The use of *ex officio* to fulfill women's post-divorce rights at the Samarinda Religious Court. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(2), 135-154.

#### ARTIKEL ELEKTRONIK

Antara News. (2025). *Polemik Pergub Jakarta 2/2025, Komnas dorong revisi UU Perkawinan*. <https://www.antaraneews.com>

DetikNews. (2025a). *Paripurna DPR setuju 52 RUU Prolegnas prioritas 2025*. <https://news.detik.com>

DetikNews. (2025b). *DPR tetapkan 64 RUU Prolegnas prioritas 2026*. <https://news.detik.com>

Hilmi. (2025, April 23). *446.359 Pasangan Bercerai, Menag Nasaruddin Umar Usulkan Revisi UU Perkawinan*. <https://cenderawasihpos.jawapos.com>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Pernyataan mengenai urgensi revisi ketentuan batas usia perkawinan*. <https://www.kemenpppa.go.id>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). *Pernyataan sikap Komnas Perempuan menanggapi Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 2 Tahun 2025*. <https://komnasperempuan.go.id>

LBH APIK Indonesia. (2024). *Advokasi – Asosiasi LBH APIK Indonesia*. <https://lbhapik.or.id>

tvOne. (2024, Maret 11). *Angka Pernikahan Turun, Angka Perceraian Naik Drastis. Apa Penyebabnya?* <https://tvOneNews.com>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Surat Edaran Mahkamah Agung*

*Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian  
Gugatan Perceraian bagi Pasangan Non-Muslim. Jakarta:  
Mahkamah Agung RI.*

Kompilasi Hukum Islam

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Agama Cibinong. (2017). *Putusan Nomor 4453/Pdt.G/2017/PA.Cbn  
tentang cerai gugat.* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia.

Pengadilan Agama Labuan Bajo. (2024). *Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lbj  
tentang cerai gugat.* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia.

